

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki daya saing usaha yang cukup tajam, karena Indonesia tidak hanya menghadapi persaingan di dalam negeri namun juga persaingan dari luar negeri. Untuk meningkatkan daya saing perusahaan perlu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Efektivitas itu sendiri berhubungan dengan penentuan apakah tujuan perusahaan yang ditetapkan telah tercapai. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai produk akhir suatu kegiatan operasional yang telah mencapai tujuannya baik dinilai dari segi kualitas ataupun dari segi kuantitas hasil kerja dan batas waktu yang telah ditargetkan. Efektivitas ditentukan antara output yang telah diberikan oleh pusat pertanggungjawaban dengan tujuan jangka pendek. Sedangkan efisiensi memperhatikan dari segi output maupun segi input. Dengan kata lain, suatu kegiatan dapat dikatakan efisien jika kegiatan tersebut telah mencapai tujuan atau output telah berhasil meminimalkan biaya dengan tujuan diperolehnya hasil yang diinginkan. Suatu kegiatan telah dikatakan efektif dan efisien jika semua kebijakan - kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak manajemen atau tindakan - tindakan perusahaan yang berkaitan dengan tujuan perusahaan dapat tercapai dengan pengorbanan atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat seminimal mungkin. Maka dari itu diperlukan pengendalian atas kegiatan operasional dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional perusahaan.

Pengendalian ini dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Pengendalian internal dapat dilakukan oleh satuan pengendalian intern di dalam perusahaan

tersebut. Pengendalian eksternal dapat dilakukan oleh perusahaan swasta baik perusahaan privat maupun publik dilakukan oleh badan pengawas keuangan. Pengendalian oleh pihak internal menjadi semakin penting seiring dengan semakin berkembangnya sistem usaha dan pemerintahan. Pengendalian tersebut menjadi semakin penting karena tidak mungkin bagi eksekutif untuk mengawasi semua kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Pada situasi ini auditor internal sangat berperan dalam hal memperhatikan dan mengawasi kegiatan yang tidak dapat diawasi sendiri oleh pihak manajemen puncak, meminimalkan risiko yang terjadi, membantu manajemen pada bidang- bidang teknis, membantu dalam proses pengambilan keputusan dan menganalisis masa depan dan tidak hanya memikirkan kinerja yang terjadi pada masa lalu.

Internal audit merupakan suatu penilaian yang telah kompleks karena sifat sensitifitas pekerjaannya. Auditor internal merupakan karyawan perusahaan yang bertugas melayani kebutuhan internal. Auditor internal berfokus pada tugasnya yaitu pada kejadian - kejadian yang terjadi di masa yang akan datang dengan melakukan evaluasi pengendalian yang khusus dibuat untuk meyakinkan bahwa pencapaian tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik. Selain itu auditor internal juga harus bersikap independen dalam melaksanakan tugasnya agar menghasilkan laporan yang berkualitas. Laporan yang disajikan oleh auditor internal tidak berisikan opini mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan kelemahan atas pengendalian internal, beserta saran - saran perbaikannya.

Kegiatan operasional perusahaan yang menjadi pekerjaan utama auditor internal yang terkait dengan aktiva tetap yang meliputi pembelian persediaan, penjualan atas aktiva tetap, pemindahan aktiva tetap, penghapusan aktiva tetap, reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan

dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai manfaat lebih dari satu tahun.¹Aktiva tersebut meliputi tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin serta sumber daya alam.

Suatu perencanaan yang matang pada saat pengendalian aktiva tetap sangat diperlukan karena berakibat pada kinerja perusahaan. Apabila perencanaan pemeliharaan dan perbaikan aktiva tetap kurang baik, perusahaan membutuhkan dana operasional yang besar untuk membiayainya.²

Salah satu contoh kasus terkait dengan aktiva tetap yaitu sebagai berikut ” Inspektorat Kabupaten Purworejo memiliki aset tetap dalam kondisi rusak berat sejumlah 33 buah senilai Rp11.473.000,00. Secara substansi, aset tetap tersebut sudah tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah. Atas aset tetap tersebut sudah diusulkan penghapusan pada tanggal 11 Oktober 2010, 4 Juli 2011, dan terakhir pada tanggal 16 Agustus 2011. Namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, belum terdapat Surat Keputusan Penghapusan atas aset tetap tersebut. Namun demikian, pada saatnya suatu aset tetap harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian aset tetap antara lain adalah penjualan aset tetap, pertukaran dengan aset tetap lainnya, atau berakhirnya masa manfaat aset tetap sehingga perlu diganti dengan aset tetap yang baru. Secara umum, penghentian aset tetap dilakukan pada saat dilepaskan atau aset tetap tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Apabila suatu aset tetap tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir, maka aset tetap tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Selanjutnya, terhadap aset tersebut secara akuntansi dapat dilepaskan, namun harus melalui proses yang dalam terminologi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah disebut dengan penghapusan.³

Terdapat beberapa masalah perolehan dan pengelolaan aktiva tetap yang sering timbul sehingga harus ditangani dengan baik meliputi :

¹ IAI. Standar Akuntansi Keuangan no.16. 1999. hal 16. 1.

² Siti Asmanah dan Astri Hariyati, Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Pada PT. Pertamina (Persero) Kantor Pusat (http://fe.umj.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=152:penelitian&catid=39:seminarpelatihanperemuan&Itemid=114)

³ <http://inspektorat.purworejokab.go.id/aset-tetap-yang-tidak-memenuhi-definisi-aset-tetap/#more-137>

1. Pembelian aktiva tetap baru meliputi pencatatan, pengakuan biaya, klasifikasi pengendalian fisik, hak dan kepemilikan dan otorisasi.
2. Penggantian ataupun penjualan aktiva tetap meliputi pencatatan, pengendalian, fisik dan otorisasi.
3. Biaya penyusutan atau depresiasi atas aktiva tetap.
4. Biaya pemeliharaan dan perbaikan atas aktiva tetap.

Kegiatan yang berhubungan dengan perolehan dan pemanfaatan aktiva tetap juga dilakukan oleh kementerian pekerjaan umum yang memiliki berbagai jenis aktiva tetap untuk dapat menunjang pencapaian tujuan dan misi kementerian pekerjaan umum. Tujuan kementerian pekerjaan umum itu sendiri yaitu untuk membina penyelenggaraan infrastruktur secara transparan dan terbuka, serta melibatkan masyarakat dengan tujuan meningkatkan peran pemerintah daerah agar terwujudnya Indonesia yang adil dan demokratis. Kementerian pekerjaan umum ini berlokasi di jalan Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam kegiatannya tersebut jenis dan klasifikasi atas aktiva tetap yang dimiliki oleh kementerian pekerjaan umum ini lebih banyak dari pada jenis aktiva lainnya, sehingga memerlukan biaya yang lebih atas pemeliharaan aktiva tetap tersebut. Sebagai lembaga pemerintah, peranan kementerian pekerjaan umum sangat dominan dalam menunjang keberhasilan pembangunan yang ada saat ini. Aktiva tetap yang dimiliki oleh kementerian pekerjaan umum ini digunakan untuk menangani bidang tugas yang menyangkut pengelolaan persungai, jaringan irigasi, pengembangan daerah rawa, pembangunan jalan dan jembatan, pembinaan tata bangunan, prasarana permukiman dan penataan ruang. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemeliharaan aktiva tetap yang dimiliki harus dapat dikendalikan dengan sebaik mungkin.

hal tersebut perlu dilakukan agar anggaran yang dikeluarkan untuk biaya pemeliharaan aktiva tetap dapat diminimalisasi agar tidak terjadi pemborosan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN INSPEKTORAT JENDRAL ATAS PENGENDALIAN AKTIVA TETAP UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN PADA KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM.”**

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh biaya pemeliharaan aktiva tetap terhadap laporan realisasi anggaran pada Inspektorat Jenderal?
- b. Bagaimana besarnya penurunan biaya terhadap biaya pemeliharaan dan perbaikan pada Inspektorat Jenderal?

2. Pembatasan Masalah

Dalam hal mengidentifikasi ini penulis melihat bagaimana cara pemeliharaan dan perbaikan aktiva tetap pada Inspektorat Jendral. Pada pembatasan masalah ini, penulis membatasi pada masalah laporan realisasi anggaran belanja biaya pemeliharaan dan perbaikan tahun 2011 - 2012 atas aktiva tetap yang ada di Inspektorat Jenderal. Aktiva tetap yang dimiliki oleh Inspektorat Jenderal adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan asset tetap lainnya. Dengan adanya perbedaan periode tahun 2011 -

2012, maka dapat dilihat tingkat keefisienan belanja biaya pemeliharaan dan perbaikan tersebut.

C. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang diberikan di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan dan prosedur pengendalian yang berlaku di Kementerian Pekerjaan Umum atas pengelolaan aktiva tetap?
2. Bagaimana pelaksanaan audit internal oleh Inspektorat Jendral pada Kemnterian Pekerjaan Umum terkait dengan pengendalian atas aktiva tetap?
3. Bagaimana peranan Inspektorat Jendral atas pengendalian aktiva tetap untuk meningkatkan efisiensi biaya pemeliharaan dan perbaikan pada Kementerian Pekerjaan Umum?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami kebijakan dan prosedur pengendalian yang berlaku di Kementerian Pekerjaan Umum atas pengelolaan aktiva tetap.
2. Untuk menelaah pelaksanaan audit internal oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum terkait dengan pengendalian atas aktiva tetap.

3. Untuk menilai peranan Inspektorat Jenderal atas pengendalian aktiva tetap untuk meningkatkan efisiensi biaya pemeliharaan dan perbaikan pada Kementerian Pekerjaan Umum.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Kementrian Pekerjaan Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kementrian Pekerjaan Umum mengenai penerapan audit yang dilakukan dengan efektif dan efisien.

2. Bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan ide - ide mengenai hal - hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan pengendalian internal atas aktiva tetap untuk meningkatkan efisiensi biaya pemeliharaan.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkharapkan dapat memperluas wawasan tentang kegiatan audit internal khususnya yang berkenaan dengan pengendalian atas aktiva tetap, serta untuk memperdalam dan mengaplikasikan teori yang telah diperoleh.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dapat menambah wawasan mayarakat mengenai kegiatan oprasional yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Khususnya untuk melayani kepentingan masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini dibuat agar pembaca mudah dalam pembahasan dan pemahaman tentang masalah yang akan dibahas, penulis membagi menjadi 3 bab yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membuat tentang uraian teoritis mengenai gambaran umum audit internal, peran dan tanggung jawab audit internal, prosedur audit internal, pemahaman mengenai sistem pengendalian internal, standar audit internal, tujuan dan ruang lingkup audit internal, perencanaan audit internal, temuan audit internal, program audit internal, pelaporan audit internal, definisi pengendalian internal, tujuan pengendalian internal, prosedur pengendalian internal, identifikasi sasaran pengendalian, keterbatasan pengendalian internal suatu entitas, definisi inspektorat jenderal, visi dan misi inspektorat jenderal, definisi mengenai aktiva tetap, klasifikasi aktiva tetap, sifat aktiva tetap, karakteristik transaksi aktiva tetap, pemeliharaan dan perbaikan aktiva tetap, sistem akuntansi aktiva tetap, rancangan pengujian atas aktiva tetap.

BAB III METEDELLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas mengenai tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan materinya, definisi oprasional dan pengukuran variabel penelitian.

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini dibahas mengenai sejarah Kementerian Pekerjaan Umum yang dijadikan sebagai objek penelitian, tujuan, strategi Kementerian Pekerjaan Umum, Tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum, struktur organisasi, uraian tugas serta wewenang Kementerian, aktiva tetap yang dimiliki oleh Kementerian Pekerjaan Umum, struktur-struktur organisasi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan aktiva tetap, dan dasar pemeliharaan aktiva tetap.

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dibahas mengenai kebijakan dan prosedur pengendalian yang dijalankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum terkait dengan pengelolaan aktiva tetap yang dimiliki, pelaksanaan audit internal atas aktiva tetap yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal serta peranan Inspektorat Jenderal sebagai auditor internal dalam Kementerian Pekerjaan Umum atas dasar penegendalian aktiva tetap untuk meningkatkan efisiensi biaya pemeliharaan yang terjadi pada Kementerian tersebut. Penulisan penelitian lebih di fokuskan pada kegiatan -

kegiatan serta tahap-tahap yang dilakukan oleh kementerian dalam meningkatkan efisiensi biaya pemeliharaan aktiva tetap.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini dibahas mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin akan bermanfaat dan berguna untuk menambah pengetahuan bagi pembaca dan Kementerian Pekerjaan Umum.